

STRATEGI DIPLOMASI INDONESIA DALAM PRESIDENSI G-20 DI BALI

¹Lian Mutiara Timur, ²Rio Sundari

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia
e-mail: lianmutiaratimur@student.uir.ac.id

ABSTRACT

This study discusses Indonesia's diplomatic strategy in implementing the G-20 Presidency. In this research the author uses the concept of Diplomacy, which is the art of building relationships with other parties or countries that can improve and strengthen relations between countries. The Group of Twenty (G-20) is a multilateral cooperation forum consisting of developed and developing countries, which was formed to find solutions to the global financial crisis and discuss general problems and national security needed to prevent future crises. Developed countries can learn how to see and treat developing countries as equal global cooperation partners as a result of the economic and political role that Indonesia currently plays. Indonesia's G-20 Presidency has tried to overcome various new problems during its one year leadership. Indonesia has reached its peak by producing a document called the Bali G-20 Leaders' Declaration. The author uses qualitative research which aims to increase understanding of the phenomena that occur because the subject and object are considered as a constant and dynamic unit. The author uses secondary data sources which are a collection of data and information that has been collected from previous research, such as books, journals, documents and other library data sources.

Keywords: *Diplomacy, Group of Twenty (G-20), Indonesia.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang strategi diplomasi Indonesia dalam pelaksanaan Presidensi G-20. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Diplomasi, yang merupakan seni untuk membangun hubungan dengan pihak atau negara lain yang dapat meningkatkan dan mempererat hubungan antar negara. *Group of Twenty* (G-20) adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari negara-negara maju dan berkembang, yang dibentuk untuk mencari solusi terhadap krisis keuangan global dan membahas masalah-masalah umum serta keamanan nasional yang diperlukan untuk mencegah krisis di masa depan. Negara-negara maju dapat belajar bagaimana melihat dan memperlakukan negara berkembang sebagai mitra kerja sama global yang setara sebagai hasil dari peran ekonomi dan politik yang dimainkan Indonesia saat ini. Presidensi G-20 Indonesia telah berusaha mengatasi berbagai masalah baru selama satu tahun kepemimpinannya. Indonesia telah mencapai puncaknya dengan menghasilkan dokumen yang disebut Deklarasi Para Pemimpin G-20 Bali. Penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap fenomena yang terjadi karena subjek dan objek dianggap sebagai satu kesatuan yang konstan dan dinamis. Penulis menggunakan sumber data sekunder yang merupakan kumpulan data dan informasi yang telah dikumpulkan dari penelitian sebelumnya, seperti buku, jurnal, dokumen dan sumber data kepustakaan lainnya.

Kata Kunci: *Diplomasi, Group of Twenty (G-20), Indonesia*

PENDAHULUAN

Diplomasi merupakan seni untuk membangun hubungan dengan pihak atau negara lain. Diplomat merupakan orang yang bertindak sebagai perwakilan negara dalam negosiasi. Diplomasi biasanya dilakukan dengan berbicara dan bernegosiasi untuk membangun kerja sama yang dapat meningkatkan dan mempererat hubungan antar negara. Diplomasi biasanya membahas segala macam kepentingan nasional, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Diplomasi telah berkembang untuk mencapai kepentingan nasional di luar yurisdiksi negara (Plano dan Olton, 1979).

Secara garis besar terdapat dua macam jenis diplomasi. Yang pertama yaitu diplomasi bilateral yang berlangsung antara dua pihak negara, yang biasanya membahas misi bersama dari kedutaan besar dan kunjungan kenegaraan. Yang kedua adalah diplomasi multilateral yang melibatkan banyak pihak dan berlangsung antara negara-negara. Dalam diplomasi multilateral, suatu pemerintah tidak hanya berhubungan dengan beberapa pemerintah pada saat yang sama, namun pemerintah lain juga sekaligus berinteraksi satu sama lain. Beberapa diplomasi multilateral menjadi salah satu bagian yang inti dalam kehidupan bernegara dan merupakan sarana utama untuk menangani masalah-masalah internasional agar dapat mencapai suatu perdamaian dunia.

Melalui sarana diplomasi, pemerintah menjalankannya dalam rangka mencapai tujuan dan mendapatkan dukungan dari negara-negara yang bersangkutan. Diplomasi dengan proses politik bermaksud untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lainnya.

G-20 merupakan salah satu contoh forum diplomasi multilateral yang terdiri dari

negara-negara dengan perekonomian besar di dunia.

G-20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari negara-negara maju dan berkembang, yang dibentuk untuk mencari solusi terhadap krisis keuangan global dan membahas masalah-masalah umum dan keamanan nasional yang diperlukan untuk mencegah krisis tersebut terulang di masa depan. G-20 terdiri dari 20 negara, bank sentral dan Uni Eropa yang resmi dibentuk pada 26 September 1999, dan pada awalnya forum ini hanya berfokus pada perekonomian dan keuangan global. G20 menjadi forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU) dengan kelas pendapatan dari menengah hingga tinggi, yang merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB (Produk Domestik Bruto) dunia (Julina et al., 2022).

Gambar 1. Anggota Negara G-20



Tujuan utama G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Anggota dari forum G20 terdiri dari Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Inggris, Argentina, Jerman, Brazil, Italia, Afrika Selatan, Perancis, Arab Saudi, Rusia, Turki, Jepang, Tiongkok, India, Korea Selatan, Australia, Indonesia dan Uni Eropa. G20 tidak memiliki tempat kesekretariatan tetap, sehingga untuk menjaga kesinambungan G20, dipegang oleh Troika yang terdiri dari negara presidensi

berjalan, negara presidensi sebelumnya dan negara presidensi berikutnya. Kata troika berasal dari bahasa Rusia yang artinya tiga serangkai. Anggota Troika G20 saat ini terdiri dari Indonesia, Italia selaku presidensi sebelumnya, dan India selaku calon presidensi berikutnya (g20.org 2022).

G-20 lahir dari rasa kekecewaan komunitas internasional terhadap negara G7 (Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Jepang, Italia dan Amerika Serikat) yang dianggap gagal dalam mencari solusi atas terjadinya krisis keuangan global pada 1990-an. G-20 awalnya hanya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun, seiring berjalannya waktu pada tahun 2008, G-20 menghadirkan Kepala Negara dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) dan pada 2010 dibentuk juga pembahasan mengenai sektor pembangunan. Sejak itu G-20 terdiri dari dua pembahasan, yaitu; Jalur Keuangan (*Finance Track*) dan Jalur Sherpa (*Sherpa Track*).

Jalur Keuangan (*Finance Track*) adalah jalur pembahasan dalam forum G20 yang berfokus pada fokus isu keuangan, antara lain; Kebijakan fiskal, Moneter dan riil, Investasi infrastruktur, Regulasi keuangan, Inklusi keuangan dan Perpajakan internasional. Pertemuan-pertemuan pada *Finance Track* dihadiri oleh Menteri Keuangan hingga Gubernur Bank Sentral dari masing-masing negara anggota. Sedangkan Jalur Sherpa (*Sherpa Track*) adalah jalur pembahasan dalam forum G20 di bidang-bidang yang lebih luas di luar isu keuangan, antara lain; Anti korupsi, Ekonomi Digital, Lapangan Kerja, Pertanian, Pendidikan, Urusan Luar Negeri, Budaya, Kesehatan, Pembangunan, Lingkungan, Pariwisata, Energi Berkelanjutan, Perdagangan, Investasi, dan Industri, serta yang terakhir mengenai Pemberdayaan Perempuan.

Keanggotaan G20 yang terdiri dari dua puluh anggota negara, yang dianggap penting dan sistemik karena negara anggotanya menguasai lebih dari 80% perekonomian dunia, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDB (*Gross National Product*), dominasi aliran investasi asing, perdagangan global, dan populasi global. Sebagian besar orang percaya bahwa jika perekonomian 20 negara anggota sehat, maka perekonomian global juga akan sehat, sehingga forum ini dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu membawa dampak besar pada perekonomian dunia, baik di dalam maupun di luar anggota.

Daftar negara anggota G-20 yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat selama beberapa dekade memberikan gambaran yang lebih baik tentang perkembangan kekuatan ekonomi global saat ini. Dibandingkan dengan jenis kerja sama multilateral lainnya, forum multilateral ini dianggap lebih fleksibel. PBB, misalnya, dianggap kuat karena merangkul hampir semua negara di dunia, tetapi sering dianggap kurang tangkas dalam mencapai kemajuan yang cepat dan tepat. PBB telah mengeluarkan banyak resolusi, tetapi hanya beberapa yang diterapkan.

Dengan asumsi ini, G-20 akan mempertahankan kerahasiaan anggotanya, dan dua tuntutan muncul sebagai konsekuensi dari kepercayaan ini. Melalui penguatan lembaga keuangan internasional, G-20 harus menunjukkan kemampuan untuk menciptakan aturan dan kerjasama untuk pemulihan ekonomi global dari krisis finansial yang mampu menciptakan tatanan ekonomi global yang stabil. Kedua, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi negara anggotanya akan berdampak positif pada ekonomi negara di luar anggotanya. (g20.org 2022).

Setelah itu, transformasi ini menjadi sangat penting untuk pemahaman kita tentang

dimensi global yang semakin luas dan mencakup lebih banyak area. Negara-negara berkembang juga mendapat manfaat dari kesadaran dimensi global ini karena pemikiran telah memungkinkan mereka untuk bergabung dalam forum besar. Walaupun forum penting G20 terbentuk sebagai akibat dari krisis G7 yang tidak terselesaikan, kesadaran global inilah yang mendorong ekstensi G7 menjadi G20. Layaknya KTT yang terjadi pada tahun 2008 akibat krisis finansial yang mengharuskan G20 melakukan pertemuan KTT setidaknya enam bulan sekali. Sampai pada KTT kedua pada tahun 2010 di Seoul, para petinggi kemudian membuat persetujuan bahwa KTT G20 akan tetap dilaksanakan setahun sekali seperti perjanjian sebelumnya (Putri, 2020).

Hal ini terus berlanjut hingga KTT tahun 2022 kemarin yang telah dilaksanakan di Nusa Dua, Bali dengan Indonesia sebagai tuan rumah. KTT 2022 tersebut bertema “*Recover Together, Recover Stronger*” dengan maksud Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Presidensi Indonesia mengangkat tiga bidang kerjasama internasional sebagai strategi pemulihan ekonomi global. Tiga bidang ini menjadi dasar pertimbangan rasional negara-negara G20 untuk melakukan kerjasama yang berbasis global untuk menciptakan ketahanan ekonomi global dan menciptakan perdamaian dunia. Indonesia fokus pada tiga pilar utama pada Presidensi G20, yaitu:

- a. Arsitektur Kesehatan Global
- b. Transisi Energi Berkelanjutan
- c. Transformasi digital dan Ekonomi

Pada bidang kesehatan global, Indonesia membahas mengenai bagaimana ekonomi dunia bisa pulih jika negara terbebas

dari ancaman, baik virus yang berakibat endemik maupun virus yang berakibat pandemic. Arsitektur kesehatan global akan diperkuat sebagai akibat dari pandemi. Presiden Indonesia mendorong transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan dengan mengedepankan keamanan, aksesibilitas, dan keterjangkauan karena energi memastikan masa depan yang berkelanjutan dan hijau serta menangani perubahan iklim secara nyata. Karena transformasi digital merupakan salah satu solusi utama untuk menggerakkan perekonomian di kala pandemi dan juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, Presidensi Indonesia berfokus pada peningkatan kemampuan digital dan literasi digital untuk memastikan transformasi digital inklusif dan bermanfaat bagi seluruh negara (Ini Diplomasi, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, melalui teknik pengumpulan data secara riset kepustakaan sebagai data primer. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur melalui buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi, laporan, berita dan lain sebagainya serta dokumen-dokumen lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

G-20 merupakan sebuah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari negara maju dan negara berkembang. Tujuannya adalah untuk mencari solusi atas krisis keuangan global saat ini dan untuk membahas peraturan umum dan khusus yang diperlukan untuk mencegah krisis tersebut terulang di masa depan. G-20, yang resmi dibentuk pada 26 September 1999, terdiri dari 20 negara, bank sentral, dan Uni Eropa. Pada awalnya, forum ini hanya berbicara tentang

perekonomian dan keuangan global. Kemudian G-20 berkembang menjadi forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). Mereka mewakili lebih dari 60% populasi dunia, 75% perdagangan global, dan 80% PDB (Produk Domestik Bruto) global (Julina et al., 2022).

Aktivitas G-20 dimulai pada tahun 1999 di Jerman, tetapi pada tahun 2008, para pemimpinnya memutuskan untuk menaikkan tingkat pertemuan forum dari tingkat menteri ke tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan negara, yang membuatnya lebih dikenal di tingkat internasional. Setelah KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) pertama kali diadakan di Washington DC, Amerika Serikat, G20 berkembang menjadi forum tingkat tinggi. Sejak itu, para pemimpin mencapai kesepakatan untuk mengadakan pertemuan Komite Tingkat Tinggi (KTT) dua kali setahun dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah finansial global yang sedang berlangsung.

Sejarah dan Latar Belakang G-20

Beberapa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1990-an menunjukkan bahwa pendekatan baru diperlukan untuk menangani dunia yang semakin kecil. Krisis ekonomi Mexico yang juga melanda negara Amerika Selatan, ditandai dengan penurunan nilai peso Mexico pada Desember 1994. Krisis moneter yang parah yang terjadi pada tahun 1997 di Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan memiliki efek yang sama pada negara-negara Asia lainnya. Selain itu, masalah keuangan juga terjadi di Rusia pada tahun 1998; di Brazil pada tahun 1998-2002; di Turki pada tahun 1999-2002; dan di Argentina pada tahun 2000-2001. Negara-negara seperti China dan India telah menanggapi krisis dengan berbagai cara, tetapi setiap pendekatan berpotensi menyebabkan

peningkatan angka pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak sistemik pada transaksi perdagangan global (Hermawan et al., 2011).

Sejarah G-7 bermula sejak tahun 1970, dimulai pada saat negara-negara maju mengalami krisis global dan krisis minyak yang sangat besar pada tahun 1973. Runtuhnya sistem nilai tukar tetap Bretton Woods dan konvertibilitas dolar AS menjadi emas menyebabkan dua organisasi Bretton Woods, *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia mencoba menerapkan reformasi yang diperlukan, tetapi gagal dalam upayanya tersebut. Berbagai permasalahan lainnya muncul hingga terjadi resesi ekonomi pada tahun 1974 di negara-negara *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang menyebabkan tingkat inflasi dan pengangguran meningkat dengan sangat tajam. Sehingga organisasi kerjasama internasional tidak lagi dapat menyatukan perbedaan-perbedaan pendapat antar negara dan lupa akan tujuan bersama.

Menteri keuangan Perancis dan Jerman Barat ikut serta dalam pertemuan moneter di Smithsonian Institution di Washington DC, pada 18 Desember 1971. Pertemuan Smithsonian tersebut membahas mengenai nilai tukar dan selanjutnya mengenai devaluasi dollar AS. Menteri Keuangan Amerika Serikat, George Shultz menyarankan agar mengadakan pertemuan secara informal di Perpustakaan Gedung Putih, bersama dengan rekan Inggris dan Jepang. Pertemuan itu berlanjut hingga secara berkala tanpa adanya publisitas guna meninjau perkembangan sistem moneter internasional. Hal ini sengaja dirahasiakan agar menghindari pengaruh pasar pertukaran.

Pertemuan yang di lakukan oleh Para menteri keuangan Prancis, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat pada 25 Maret 1973 di

perpustakaan Gedung Putih tersebut dinamai *'Library Group'*. Keempat menteri keuangan ini bertemu lagi pada bulan Juli, dan pada bulan September 1973 Jepang ikut serta didalam forum ini. Dengan bergabungnya Jepang kedalam pertemuan forum ini yang dilakukan secara berkala selama beberapa tahun, forum ini berubah nama menjadi G-5 (*Group of Five*). Pertemuan para menteri keuangan negara G-5, pada tanggal 24-26 November 1973 di Perancis, membahas mengenai topik reformasi sistem moneter internasional, minyak, prospek nilai tukar dan neraca pembayaran, bunga kredit ekspor, dan kontrol Amerika Serikat atas ekspor modal. Pada pertemuan selanjutnya, Italia bergabung kedalam forum pada Januari 1974, sehingga forum ini berubah kembali menjadi forum G-6 (*Group of Six*).

Di waktu yang bersamaan pada saat sistem nilai tukar tetap runtuh, pada tahun 1975 Presiden Prancis (Valery Giscard d'Estaing dan Kanselir Helmut Schmidt) melaksanakan pertemuan tidak resmi antar negara, dimana negara-negara tersebut membahas mengenai kebijakan ekonomi internasional dan menyepakati langkah awal untuk mengatasi krisis global, di Chateau de Rambouillet, Paris. Dari pertemuan itulah awal terbentuknya G-6 (*Group of Six*) yang anggota negara awalnya terdiri dari; Prancis, Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan Italia.

Pada tahun berikutnya, Kanada diundang untuk bergabung kedalam anggota forum dan berubah nama menjadi G-7 (*Group of Seven*) pada tahun 1976. Hal ini di cetuskan pada pertemuan G-7 pada KTT di Puerto Rico pada tahun 1976 yang fokus pembahasan dalam forum tersebut berfokus pada permasalahan kebijakan moneter dan keamanan. Pada KTT pertama tersebut, Kanada merekomendasikan solusi dari

pembahasan dan memutuskan untuk bertemu setiap tahun kedepan dengan presidensi yang bergantian di setiap anggota negara forum tersebut. G-7 meluncurkan inisiatif untuk membiayai masalah dan menyelesaikan krisis melalui aksi bersama. Contoh dari langkah-langkah tersebut adalah keringanan utang untuk negara-negara berkembang.

Pada tahun 1996, G-7 bekerja sama dengan Bank Dunia, dengan meluncurkan 42 inisiatif untuk negara miskin berutang berat (*Heavily Indebted Poor Countries* atau HIPC) bersama dengan Inisiatif pengurangan utang multilateral (*Multilateral Debt Relief Initiative* atau MDRI), yang berjanji pada tahun 2005 untuk menghapus utang negara-negara Asosiasi Pembangunan Internasional melalui program MDRI. Pada tahun 1999, kelompok G-7 juga memutuskan untuk lebih terlibat langsung dalam pengelolaan sistem moneter internasional dengan membentuk *Financial Stability Forum* (FSB). FSB terdiri dari otoritas keuangan nasional utama seperti menteri keuangan, gubernur bank sentral dan badan keuangan internasional.

Tujuan utama G-7 adalah untuk berbicara dan terkadang bekerja sama untuk membantu menyelesaikan masalah global, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Grup ini telah berbicara tentang sistem moneter, krisis keuangan, dan krisis global besar seperti kekurangan minyak sejak didirikan pada awal 1970-an. Selain itu, G-7 melihat peluang untuk bertindak bersama dalam inisiatif untuk mendanai masalah dan meredakan krisis, yang juga termasuk berbagai upaya untuk meringankan utang bagi negara-negara berkembang.

G-7 bekerja sama dengan Bank Dunia pada tahun 1996 meluncurkan program untuk 42 negara miskin yang berhutang banyak yang juga melibatkan Organisasi Inisiatif Pengurangan Utang Multilateral (*Multilateral*

Debt Relief Initiative, MDRI), yang berjanji pada tahun 2005 untuk membatalkan utang negara-negara Asosiasi Pembangunan Internasional yang telah melalui program MDRI. Selain itu, kelompok ini memutuskan untuk lebih terlibat langsung dalam mengelola sistem moneter internasional dengan membentuk Forum Stabilitas Keuangan (FSB) pada tahun 1999. Forum ini terdiri dari gubernur bank sentral, menteri keuangan dan badan keuangan internasional yang bertanggung jawab atas keuangan nasional.

G-7 telah menanggapi perkembangan ekonomi dunia, termasuk ketika Uni Soviet berjanji untuk membangun ekonomi dengan pasar yang lebih bebas dan mengadakan pemilihan presiden langsung pertamanya pada tahun 1991. Presiden Boris Yeltsin mengadakan pertemuan dengan negara-negara anggota G-7 sebelum pertemuan G-7 tahun 1994 di Naples, yang kemudian dikenal sebagai P-8 (Politik 8). Pada tahun 1998, para pemimpin, termasuk Presiden AS Bill Clinton, meminta Rusia untuk bergabung dengan G-7 sebagai anggota penuh, membentuk kelompok resmi yang dikenal sebagai G-8 (Chen, 2021).

G-8 merupakan kelompok ekonomi maju terbesar di dunia yang telah menetapkan posisinya sebagai penggerak industri. Para pemimpin negara anggota, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Italia, Inggris Raya (UK), Jerman, Prancis, dan Rusia bertemu secara berkala untuk membahas masalah ekonomi dan moneter internasional. Di forum ini, para pemimpin dari negara-negara anggota G-8 termasuk perdana menteri, anggota kabinet, presiden dan penasihat ekonomi akan berkumpul untuk bertukar ide, bertukar pikiran serta membahas strategi inovatif yang akan menguntungkan setiap negara dan dunia secara keseluruhan. Negara anggota memiliki kekuatan yang signifikan karena gabungan

kekayaan dan sumber daya mereka mencakup setengah dari ekonomi global (Liberto, 2021).

Pada tahun 2014 Rusia diskors tanpa batas waktu dari grup tersebut setelah mengambil paksa krimea dari republik Ukraina. Setelah anggota lain grup tersebut tidak setuju dengan perlakuannya terhadap Ukraina, Rusia tersingkir dari dari grup tersebut dan meninggalkan G-8 secara permanen pada tahun 2017. Namun, kemungkinan Rusia bergabung kembali dengan grup tersebut masih ada. Presiden AS Donald Trump diundang ke konferensi G-7 pada tahun 2020 dan secara aktif mendorong kembalinya Rusia ke organisasi tersebut, dengan syarat Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri konflik Ukraina, Presiden Prancis Emmanuel Macron setuju dengan gagasan ini. Namun karena pandemi virus corona, pertemuan itu dibatalkan (Liberto, 2021).

Pada saat KTT G-20 2014 di Brisbane yang di tuan rumahi oleh Australia, para pemimpinnya mengusulkan untuk melarang Rusia untuk ikut serta dalam KTT karena hal yang sudah dilakukannya yaitu pencaplokkan krimea terhadap Ukraina. Namun Rusia tetap menjadi anggota kelompok yang lebih besar, karena sebagian dari anggota KTT mendorong kuat Rusia untuk tetap ada yaitu negara anggota BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) (Kenton, 2022).

Ketika negara-negara berkembang mulai mewakili bagian yang lebih besar dari ekonomi global, ketiadaan forum tentang masalah keuangan internasional yang mencakup negara-negara berkembang menjadi lebih mencolok. Disebabkan hal ini, Kelompok 20 (G-20) dibentuk pada tahun 1999 dan terdiri dari semua anggota G-7, serta 12 negara tambahan dan Uni Eropa. Dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan pasar di negara-negara anggota G-20 seperti Brasil, Cina, Meksiko, Afrika

Selatan dan India, banyak pengamat sekarang melihat G-20 merebut sebagian besar peran dan keunggulan yang pernah dipegang oleh G-7. Sehingga sampai saat ini G-20 bertanggung jawab untuk memajukan ekonomi global, perdagangan internasional, dan peraturan pasar keuangan (Chen, 2021).

Indonesia bergabung dalam Forum G-20

Indonesia merupakan salah satu perwakilan negara berkembang yang berasal dari Asia Tenggara yang bergabung dan bekerja sama dengan anggota G20 lainnya guna menghadapi dan memecahkan masalah isu global dan regional. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara dengan perkembangan jumlah penduduk dan perekonomian yang tumbuh pesat yang nantinya diharapkan akan membawa harapan yang baru bagi negara berkembang lainnya di kawasan Asia Tenggara. Indonesia telah terlibat dalam ekonomi yang terintegrasi baik di tingkat regional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta di tingkat internasional yaitu Organisasi Perdagangan Dunia atau yang kita kenal dengan World Trade Organization (WTO) (Salim, 2011).

Terpilihnya Indonesia untuk menjadi anggota tetap forum G20 ini didasarkan pada beberapa alasan penting. Yang pertama adalah peran yang dia mainkan dalam membangun ASEAN, yang didirikan untuk berfungsi sebagai jembatan untuk menangani masalah ekonomi regional. Kesempatan untuk bergabung dengan klub ekonomi eksklusif ini datang dari pengalaman Indonesia. Selain itu alasan penting lainnya, Indonesia memiliki pengalaman yang baik dalam menangani krisis keuangan tahun 1998, dan negara itu benar-benar terlibat dalam forum ekonomi dunia.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki peran penting dalam

perdagangan global. Indonesia sebagai satu-satunya anggota G20 di wilayah ini, memberikan harapan baru untuk mewakili kepentingan negara-negara ASEAN dan negara-negara berkembang lainnya. Forum ini memiliki banyak orang yang menaruh harapan pada perwakilan Indonesia. Akses bebas ke pasar global untuk bahan mentah yang mereka produksi, yang selama ini terkendala oleh kebijakan proteksi nasional oleh Amerika Serikat, Eropa dan negara-negara besar lainnya, merupakan hal utama yang menjadi harapan baru bagi banyak negara berkembang.

Indonesia telah menjadi anggota G20 sejak forum multilateral ini sejak dibentuk pada tahun 1999. Bagi Indonesia forum eksklusif ini merupakan arena bergengsi tinggi di mana Indonesia dapat mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya. Namun Indonesia juga memahami posisi dan tanggungjawab vitalnya untuk mewakili negara-negara berkembang. Berbagai alasan mengapa Indonesia bisa terlibat dalam forum G20 adalah sebagai berikut:

1. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonominya yang tercatat cukup penting di antara negara-negara berkembang lainnya, sehingga Indonesia mempunyai hak istimewa untuk bergabung dalam forum tersebut.
2. Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah China, Amerika Serikat dan India.
3. Mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam, sehingga berpotensi untuk menjembatani perbedaan-perbedaan di antara peradaban dunia.

4. Indonesia merupakan negara demokrasi baru yang sedang berada dalam proses konsolidasi.
5. Indonesia memiliki lokasi geografis yang penting. Indonesia adalah satu-satunya negara anggota ASEAN yang tetap menjadi anggota G20. Tidak diragukan lagi, perlu dicatat bahwa Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang telah mengalami krisis ekonomi yang mengerikan sebelumnya dan telah berhasil mengatasinya dengan cukup baik.

Beberapa hal inilah yang menjadi alasan kuat terpilihnya Indonesia bergabung dalam forum G20. Selain potensinya sebagai pusat pembelian global karena jumlah penduduknya yang besar, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil akan berdampak sistemik ke pertumbuhan ekonomi negara lain di Asia Tenggara dan lebih lanjut memberikan kontribusi ke stabilitas perekonomian di Asia dan dunia secara keseluruhan. Keberhasilan Indonesia akan menjadi contoh yang menarik lainnya bagi penguatan demokrasi liberal di seluruh dunia.

Terpilihnya Indonesia menjadi Presidensi G20 pada tahun 2022 merupakan harapan besar bagi Indonesia untuk bisa bangkit dari ketidakstabilan ekonomi pasca serangan Covid-19 sejak tahun 2019-2021. Dengan mengambil tema “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama dan Kuat Bersama” menjadi tema yang tepat untuk seluruh negara bangkit dari keterpurukan, krisis perekonomian global, yang artinya tema ini memiliki logika berpikir bahwa masalah kesehatan global merupakan masalah bersama dan harus diselesaikan secara bersama-sama pula.

Indonesia sebagai Presidensi G-20

Presidensi tahunan dan presidensi sebelumnya, yang dikenal sebagai Troika, secara ketat berkolaborasi untuk menjaga agenda penting G20. Indonesia, sebagai presidensi berjalan, Italia presidensi sebelumnya dan India presidensi selanjutnya yang disebut sebagai anggota Troika G20. Indonesia sudah berpartisipasi dalam berbagai tingkat pertemuan G20, dari tingkat working group hingga Konferensi Tingkat Tinggi G20. Dalam pertemuan Riyadh Summit 2020, Indonesia ditunjuk sebagai presiden G20 pada tahun 2021 dan tanggung jawab itu diberikan pada akhir KTT Roma pada 30-31 Oktober 2021.

Gambar 2. Presiden RI menerima handover Presidensi G20 di KTT Roma.



Indonesia menjadi tuan rumah pada Presidensi G-20 untuk pertama kalinya. Hal ini di sepakati pada KTT G20 sebelumnya, yaitu di Roma, Italia pada tanggal 31 Oktober 2021. Pemandangan tugas tersebut di sepakati bersama yang memegang kekuasaan yaitu Presiden Joko Widodo (Presiden Indonesia) dari yang sebelumnya PM Mario Draghi (Presiden Italia). Presidensi G20 berlangsung selama satu tahun mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Indonesia menjadi satu-satunya wakil negara berkembang di G20 dan ASEAN (Solechah et al, 2023).

Indonesia sebagai satu-satunya anggota ASEAN, memiliki kesempatan untuk

menjadi presiden KTT G20, yang telah berlangsung di Bali pada November 2022. Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan keinginannya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi global. Keanggotaan Indonesia dalam G20 menunjukkan adanya keterlibatan dalam perekonomian di tingkat internasional. Ini disebabkan oleh fakta bahwa perekonomian Indonesia stabil terutama selama pandemi COVID-19, sehingga pemilihan ini diharapkan dapat membawa perubahan selama transisi dan menawarkan solusi untuk perekonomian global.

Saat COVID-19 melanda, rekam jejak perekonomian Indonesia meningkat dan berkembang, mengingat banyak negara lain yang juga mengalami penurunan ekonomi. Ini menjadikan Indonesia layak menjadi bagian dari G20. Indonesia telah mencapai prestasi yang signifikan dengan menjadi presiden G20. Indonesia harus memanfaatkan posisi ini untuk menunjukkan kepentingannya dengan menunjukkan kredibilitas dan akuntabilitasnya. Hal ini akan meninggalkan kesan yang baik di mata dunia dan memiliki pengaruh juga pada dorongan yang diterima oleh Indonesia dalam forum global dan di mata dunia (Fadly Kurniawan, 2023).

KTT G20 adalah pengalaman baru bagi Indonesia karena memiliki kesempatan untuk menjadi presiden G20. Selain itu, Indonesia akan bertemu dengan negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan dan bahkan berusaha untuk mendominasi pasar internasional. Presidensi G20 Indonesia berada di posisi strategis yang harus segera menetapkan target dan kebijakan berdasarkan situasi ekonomi saat ini, dan KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali ini akan membahas masalah kepentingan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Potensi Indonesia untuk menjabat sebagai presiden G20 akan berdampak pada berbagai jenis kerjasama, baik kerjasama bilateral maupun kerjasama multilateral. Dengan adanya forum ini menjadi kesempatan bagi negara G-20 untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi mereka. Di satu sisi, pertemuan ini harus dilakukan guna meningkatkan diplomasi sesama anggota G-20. G-20 juga dapat mendorong pembicaraan tentang perjanjian perdagangan yang sudah ada atau yang akan datang. Melalui forum G20, Indonesia bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi internasional. Oleh karena itu, kesempatan seperti ini harus dimanfaatkan untuk mempromosikan citra Indonesia ke banyak negara.

Gambar 3. Logo Presidensi G-20 Indonesia



Logo dari kepresidenan Indonesia paada pelaksanaan Presidensi G-20 memiliki berbagai elemen grafis yang mempunyai makna dan arti masing-masing. Motif kawung melambangkan semangat perbaikan dan pelayanan kepada sesama. Gunung menunjukkan langkah mencapai pemulihan ekonomi global yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Merah dan biru, merah pada gunung Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan biru identitas G20 Indonesia sebagai negara maritim. Yang terakhir tumbuhan sulur, yang merupakan visi Indonesia tentang semangat pemulihan yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam presidensi G-20 Indonesia, ada 9 negara yang menjadi tamu undangan, yaitu; Ketua *The African Union Development Agency* (AU-NEPAD), Ketua Uni Afrika, Ketua *Pacific Island Forum* (PIF), Ketua *The Caribbean Community* (CARICOM), Persatuan Emirat Arab, Ketua ASEAN, Singapura, Belanda dan Spanyol. Terdapat juga 10 organisasi internasional yang ikut serta dalam presidensi, yaitu; *United Nation* (UN), *International Labour Organization* (ILO), *World Bank*, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) *Islamic Development Bank* (IsDB), *Financial Stability Board* (FSB), *International Monetary Fund* (IMF), *Asian Development Bank* (ADB), *World Trade Organization* (WTO) dan *World Health Organization* (WHO).

Hasil konkret dari KTT G-20 Presidensi Indonesia di Bali terdapat 52 paragraf, yang inti dari hasil tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dana untuk penanganan pandemic yang terkumpul sebanyak USD 1,5 miliar yang dihasilkan dari *pandemic fund*.
2. Pembentukan sebuah operasionalisasi, *Resilience and Sustainability Trust* (RST) dibawah IMF dengan sejumlah USD 81,6 miliar untuk bantuan terhadap negara-negara yang menghadapi krisis akibat dampak COVID-19.
3. Indonesia mendapatkan dana untuk transisi energi sebesar USD 20 miliar.
4. Komitmen lingkungan bersama: Para pemimpin negara G-20 setuju untuk melindungi 30% daratan dan lautan pada tahun 2030 dan secara sukarela mengurangi degradasi tanah sampai 50% pada tahun 2040.

Strategi Diplomasi Indonesia dalam Presidensi G-20 di Bali

Menurut data yang dikumpulkan oleh peneliti, Arsitektur Kesehatan Global muncul sebagai agenda paling penting dengan rata-rata skor (66,67%), diikuti oleh Transisi Energi dengan rata-rata skor (17,94%), dan Transformasi Digital dengan rata-rata skor (8,36%). Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sangat memprioritaskan masalah kesehatan. Dari tiga agenda prioritas yang diajukan, indikator dengan skor tertinggi adalah Ketahanan Sistem Kesehatan Global (69,41%), Pendanaan Transisi Energi (30,00%), dan Konektivitas dan Pemulihan Pascapandemi (9,29%). Skor-skor ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk memprioritaskan masalah seperti ketahanan sistem kesehatan, pendanaan transisi energi, dan konektivitas selama presidensi. (Ramadhanto et al, 2022).

1. Arsitektur Kesehatan Global

Peneliti menemukan bahwa langkah yang diambil Indonesia sudah berorientasi ke luar pemerintah. Indonesia sangat berusaha untuk mendorong negara lain untuk mengubah tata kelola kesehatan global. Peneliti berpendapat bahwa fokus pemerintah Indonesia pada agenda ini disebabkan oleh harapan bahwa seluruh dunia segera pulih dari pandemi COVID-19 dan menjadi lebih siap untuk menghadapi ancaman kesehatan yang mungkin muncul di masa depan. Beberapa masalah yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia terkait agenda ini adalah; belum ada sistem yang mengatur dan menyimpan dana kesehatan untuk menghadapi ancaman kesehatan di masa depan; masih ada ketimpangan dalam akses ke layanan kesehatan, vaksin, dan obat-obatan; belum ada standar protokol kesehatan global yang dapat digunakan sebagai pedoman lalu lintas manusia; dan masih

kurangnya kerja sama lembaga riset kesehatan antar negara.

Dalam agenda ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan ketahanan sistem kesehatan global dengan mengajukan wacana untuk membentuk badan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan sumber daya kesehatan global untuk pembiayaan darurat kesehatan, pembelian vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan. Selain itu, pemerintah Indonesia mengajak negara lain untuk membuat protokol kesehatan global yang mengatur perjalanan lintas batas. Selanjutnya, ini memberdayakan negara berkembang untuk meningkatkan kemampuan manufaktur lokal, pengelolaan hak paten, akses ke teknologi kesehatan, dan investasi dalam pembuatan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan. Pada tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah membuat garis besar yang akan membantu mempercepat kemajuan industri farmasi.

Indonesia menekankan pentingnya pembentukan *global health fund* secara mendunia, inisiatif ini sejalan dengan pandangan (Yode, 2017) yang mengatakan bahwa salah satu wujud penting tata kelola kesehatan global adalah bagaimana negara memandang dirinya sendiri dalam mengatasi permasalahan serta kewajiban menyediakan pendanaan bagi permasalahan kesehatan yang timbul di luar negeri. Mengingat hal ini, upaya Indonesia untuk memperkuat tata kelola kesehatan global perlu memasukkan koordinasi dan kerja sama sebagai elemen kunci untuk mendorong tindakan kolektif di antara berbagai aktor, institusi dan gagasan untuk mencapai ketahanan kesehatan global pada masa yang akan mendatang (Ramadhanto et al, 2022).

Tata kelola harus memprioritaskan agenda kesehatan global saat menangani pandemi COVID-19 dan memulihkan

perekonomian dunia. Pemimpin KTT G20 dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap agenda kesehatan dunia. Misalnya, Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yang meminta para pemimpin G20 untuk berkomitmen dan mendukung program vaksinasi agar dapat mencapai 40% populasi yang menerima vaksinasi pada akhir tahun 2021 dan 70% pada pertengahan tahun 2022 (WHO, 2021).

Indonesia membuat strategi untuk mencapai semua tujuan subagendanya. Pertama, melalui pembentukan mekanisme Dana Kesehatan Global, Indonesia bekerja sama dengan WHO dan Bank Dunia untuk meningkatkan pertahanan sistem kesehatan global. Indonesia juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan internasional guna mencegah krisis kesehatan di masa mendatang serta memperluas akses vaksin dan obat. Kedua, Indonesia mendukung penyelarasan sistem dan mekanisme protokol kesehatan global agar setiap negara dapat mematuhi protokol global. Terakhir, Indonesia berkomitmen untuk membangun pusat pengetahuan dan manufaktur global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Indonesia menekankan bahwa penyebab krisis ini memburuk adalah ketidakseimbangan distribusi pengetahuan, mitigasi, kemampuan, dan respons terhadap pandemi. Ketimpangan ini dapat menyebabkan dampak terburuk dari permasalahan yang disebutkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk meredistribusikan pembuatan pusat pengetahuan.

Beberapa negara anggota G20 yang membuat vaksin, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Rusia, Tiongkok, dan India, adalah bukti bahwa negara-negara anggota dapat memainkan peran penting dalam memastikan distribusi alat-alat COVID-19 yang adil. Negara-negara anggota G20

memiliki tingkat PDB yang lebih tinggi daripada negara lain, yang membuat mereka mampu memesan vaksin COVID-19 dalam jumlah yang besar. Berdasarkan laporan UNICEF, negara-negara anggota G20 telah menerima jumlah vaksin per kapita 15 kali lebih banyak daripada negara-negara berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, banyak pihak mendorong para pemimpin G20 untuk memberikan vaksin dan peralatan lainnya untuk negara berkembang, terutama di Afrika. Pada Mei 2021, hanya sekitar 1% dari 1,3 miliar dosis vaksin yang dibagikan ke negara-negara di kawasan ini.

Melalui KTT Kesehatan Global, G-20 telah berjanji untuk mendorong distribusi vaksin yang merata ke negara-negara terbelakang dan berpendapatan rendah. Namun, G-20 belum menetapkan rencana khusus. Sebaliknya, negara-negara anggotanya telah bekerja sama dengan *Covax Facility* untuk memastikan deklarasi ini dilaksanakan. Selain itu, beberapa negara anggota menawarkan bantuan dan donasi secara pribadi melalui kerja sama bilateral atau melalui organisasi dan program lain seperti UNICEF, *Coalition Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI), *Unitaid*, *GAVI Alliance*, dan WHO Global Funds. Misalnya, pada bulan Oktober 2021, Jerman memberikan 844.800 dosis vaksin Astra Zeneca ke Filipina melalui *Covax Facility*. Pada bulan November 2021, Kanada juga memberikan 1,9 juta dosis Moderna ke Uganda melalui *Covax Facility*. Berdasarkan kontribusi negara-negara anggota G20 untuk mengurangi pandemi COVID-19, Amerika Serikat dan Jerman merupakan negara anggota yang memberikan jumlah donasi paling tinggi dibandingkan anggota lainnya (Naqabandiyah et al., 2022).

Hasil dari presidensi Indonesia mengenai Arsitektur Kesehatan Global di

sampaikan langsung oleh Presiden Indonesia, yang menyatakan bahwa dana untuk *Pandemic Fund* telah terkumpul sebanyak US\$ 1,5 miliar atau setara Rp 23,4 triliun (kurs Rp 15.600). Dana ini berfungsi sebagai kumpulan dana yang diberikan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk mengantisipasi kemungkinan pandemi berikutnya. Selanjutnya, terkumpul dana dari IMF (*International Monetary Fund*) yang disebut pembentukan dan operasionalisasi *Resilience and Sustainability Trust* (RST) sebesar USD 81,6 miliar, yang akan digunakan untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis.

2. Transisi Energi Berkelanjutan

Terkait isu prioritas kedua tentang transisi energi, pemerintah Indonesia mengakui pentingnya mencapai kesepakatan global untuk mempercepat transisi energi. Meskipun demikian, dengan mengedepankan prinsip transisi energi yang berkeadilan melalui G20, Indonesia ingin memastikan transisi energi yang berlangsung perlu mempertimbangkan situasi ketimpangan struktural yang selama ini ada, terutama antara negara maju dan negara yang sedang berkembang. Transisi energi yang berkeadilan dalam pandangan Indonesia dapat diraih melalui perluasan akses energi bagi negara-negara Selatan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi bersih, serta memperkuat pembiayaan bagi transisi energi.

Ada tiga hal yang menjadi bahasan utama dalam Energy Transition Working Group (ETWG) G20 di bawah Presidensi Indonesia tahun ini, yaitu: pertama, akses energi yang mencakup ketersediaan energi modern dan berkelanjutan serta transisi energi di negara kepulauan; kedua, peningkatan teknologi bersih yang mencakup efisiensi energi, sistem energi emisi rendah, dan permintaan energi yang meningkat; dan yang

ketiga, pendanaan transisi energi (Hassan et al, 2022).

Agenda transisi energi sebagai salah satu pilar adaptasi atas perubahan iklim telah menjadi komitmen global dan selalu menjadi pembahasan dalam berbagai forum antarbangsa yang membahas perubahan iklim. *The Energy Transition Commission* (ETC) merupakan koalisi global yang beranggotakan perwakilan dari kelompok bisnis, akademisi, lembaga keuangan, dan aktivis sosial yang berkomitmen untuk mendorong kerja sama dalam rangka mempercepat transisi ke *zero emission future*. Komite ini mengembangkan peta jalan transisi dan instrumen untuk mencapainya berdasarkan analisis yang dikembangkan para ahli dan praktisi di *energy-intensive value chains*. Di isu-isu transisi energi yang rumit, komisi bekerja di bawah payung Mission Possible Platform, sebuah forum yang didirikan oleh ETC dan *World Economic Forum*.

Transisi energi yang saat ini sedang menjadi wacana global merupakan kelanjutan dari proses transisi yang sudah berlangsung sebelumnya. Dunia sudah mengalami setidaknya tiga kali transisi energi. Saat ini, transisi energi ditandai dengan pergeseran sistem energi nasional dan global, yang mencakup model produksi, distribusi, dan konsumsi energi berbasis fosil (terutama minyak, gas alam, dan batu bara) ke sumber energi baru dan terbarukan (misalnya angin, matahari, panas bumi, dan listrik nonfosil). Pergeseran sumber energi ini membawa dampak signifikan terhadap keseluruhan aspek tata kelola dan *supply-chain* energi. Dua transisi energi yang sebelumnya terjadi, yaitu dari sumber *biofuel* tradisional (terutama kayu dan minyak hewan) ke batu bara pada akhir abad 19, dan dari batu bara ke minyak bumi dan gas pada pertengahan abad 20 (Lacey, 2019).

Dalam sejarahnya, peralihan ke sumber energi baru tersebut bersifat disruptif terhadap sistem energi sebelumnya, dan memicu terjadinya perubahan struktural yang bersifat jangka panjang. Pergeseran sistem energi selalu memakan waktu yang panjang, membutuhkan pengenalan teknologi baru, dan menuntut adanya perubahan mempercepat proses transisi, namun pada saat bersamaan juga menunjukkan kepiawaian untuk menjadi pemain inti transisi sebagai strategi bisnis untuk tetap mengontrol sistem energi global.

Meskipun berbagai pihak bersepakat akan pentingnya transisi menuju energi terbarukan, ditunjukkan dalam berbagai narasi dan kesepakatan berbagai forum internasional, capaian transisi energi secara global masih rendah. Analisis komparatif *World Economic Forum* tahun 2021 menunjukkan hanya 13 dari 115 negara yang memiliki *roadmap* nyata menuju transisi energi. Sejumlah negara seperti Swedia, Norwegia, Denmark, dan Swiss menunjukkan kinerja yang sangat tinggi untuk memperbesar komposisi sumber energi terbarukan, dan menjadikan sistem energi bersih dan terbarukan sebagai pilar penyediaan energi (*World Economic Forum*, 2021).

Melalui skema ini, pemerintah menarik keterlibatan swasta untuk pembiayaan infrastruktur dengan berbagai fasilitas dan insentif. Saat ini ada 13 bank di Indonesia yang bergabung dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI). Pada kuartal pertama 2021, empat bank yang menjadi anggota IKBI telah mengucurkan 30 triliun (US\$200 juta) untuk proyek-proyek energi terbarukan. Antara tahun 2018-2020, empat bank tersebut telah menyalurkan pinjaman dan penjaminan emisi senilai total Rp166 triliun (US\$8,8 miliar) untuk proyek-proyek batu bara. Namun demikian, perlu dicatat, meskipun pembiayaan energi

terbarukan meningkat, bank-bank lokal masih menyalurkan kredit mereka ke proyek pertambangan batu bara. Skema pembiayaan lainnya melalui penerbitan green bond, baik di dalam maupun di luar negeri, menciptakan bauran platform pembiayaan bagi sektor swasta, filantropi dan dukungan lembaga multilateral (Kemenkeu, 2021).

Salah satu dukungan dari lembaga internasional berasal dari *Asian Development Bank* (ADB), yang menyetujui pinjaman senilai US\$150 juta tersebut menghentikan ketergantungan pada batu bara, dengan menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga batu bara lebih awal. Dalam skema ETM, setidaknya 9,2 GW PLTU telah diidentifikasi untuk dipensiunkan dini. Di Indonesia, proyek percontohan akan dimulai dengan penghentian operasi tiga PLTU dengan total kapasitas 1,77 gigawatt, dimulai pada 2022-2023. Terlepas dari berbagai komitmen dan sejumlah kebijakan yang sudah dikeluarkan untuk mendorong transisi energi, dalam implementasinya, capaian bauran energi belum bisa memenuhi target yang diharapkan.

Di tengah agenda internasional untuk mewujudkan transisi energi yang masih belum solid, Indonesia bisa mengambil peran kepemimpinan dalam mewujudkan transisi energi berkeadilan dalam forum G20 Bali. Presidensi Indonesia 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, menjadi momentum Indonesia untuk menentukan prioritas agenda dan memimpin rangkaian pertemuan untuk mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan. Sidang pertama *Energy Transitions Working Group* (ETWG) yang berlangsung di Yogyakarta pada 24-25 Maret, misalnya, membahas aksesibilitas energi, peningkatan energi bersih, serta peningkatan pembiayaan energi. Ketiga agenda ini secara aklamasi disepakati oleh negara-negara G20.

Selain negara-negara G20, ETWG juga dihadiri 10 negara undangan, 8 organisasi internasional, baik secara langsung maupun virtual (Kumparan, 2022).

Dari sisi proses, negara anggota G20 bersepakat bahwa ETWG harus menghasilkan *deliverable* yang lebih konkret. Hasil sidang ETWG pertama di Yogyakarta, akan ditinjau perkembangannya pada pertemuan ETWG kedua di Labuan Bajo pada bulan Juni 2022. Harapannya, pada saat ETWG ketiga, September 2022, negara-negara G20 akan menyepakati keluaran dan komunike Menteri Energi G20 (Soda, 2022). Selain ETWG, rangkaian pertemuan seperti *Energy Transition Ministerial Meeting* (ETMM), webinar, investment forum, dan event-event paralel lain juga digelar untuk menyukseskan forum transisi energi G20 (Sutrisno, 2022).

Pertemuan ETWG pertama menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Pertama, anggota G20 menyatakan pentingnya memiliki rencana dan kemitraan teknologi yang jelas dan ambisius untuk mencapai *net zero emissions* sekaligus merealisasikan target pembangunan *SDGs* 2030. Kedua, anggota G20 berkomitmen mengenai pentingnya keamanan dan ketahanan rantai pasok energi untuk menjamin keamanan energi dan proses transisi energi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ketiga, transisi energi yang adil dan berkelanjutan mendapat perhatian penuh para peserta, termasuk pentingnya memberikan perhatian kepada semua jenis teknologi dan sumber energi terbarukan, serta skema pembiayaan yang bisa mengakselerasi transisi energi sekaligus memastikan kemanfaatan ekonominya. Sementara dalam rencana aksi untuk memperluas kerja sama internasional, Indonesia mengusulkan perlunya mengidentifikasi area kerja sama baru, misalnya teknologi untuk

mendekarbonisasi sektor pembangkit listrik dan industri lainnya yang masih bertumpu pada bahan bakar fosil.

Selain itu, ETWG berkonsentrasi pada masalah seperti keamanan energi, akses, dan efisiensi, serta transisi menuju sistem energi karbon, yang juga mencakup investasi dan inovasi dalam teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Indonesia berkomitmen untuk melakukan transisi ke energi berkelanjutan dengan menetapkan target bauran energi sebesar 23 energi baru dan terbarukan pada tahun 2025, pemenuhan *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060, pengurangan dan penghapusan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), penerapan pajak karbon dengan tariff Rp.30 per kilogram CO₂e pada tanggal 1 April 2022, dan *Karbon Capture Usage and Storage* (CCUS) untuk mengurangi emisi karbon sekaligus meningkatkan produksi energi. Diharapkan upaya ini mampu mewujudkan transisi energi berkelanjutan.

Presiden Amerika Serikat (Joe Biden) mendukung proyek transisi energi di Indonesia dengan dana hingga USD 20 miliar atau sekitar Rp310 triliun (kurs USD 15,548 per dolar AS). Joe Biden membahas ini pada di KTT G20 Indonesia, berharap dana tersebut dapat secara signifikan mengurangi emisi karbon serta memperluas jaringan pembangkit listrik yang menggunakan energi baru dan terbarukan. Dana ini merupakan hasil dari kerja sama antara Amerika Serikat, Jepang, institusi keuangan dunia dan pihak swasta serta lembaga pendanaan internasional, yang diharapkan dapat membantu Indonesia dalam mempercepat proses transisi energi.

3. Transformasi Digital dan Ekonomi

Mengenai isu prioritas ketiga, pemerintah Indonesia ingin memastikan bagaimana nilai ekonomi dengan teknologi

digital dapat membantu proses pemulihan pasca-COVID-19. Staff Khusus Bidang Digital dan SDM/Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi, dalam Seminar Presidensi G20 dan Agenda Strategis Indonesia di UGM pada tanggal 17 Maret 2022 menegaskan setidaknya terdapat empat isu penting yang menjadi perhatian Indonesia.

1. Bagaimana menciptakan nilai ekonomi agar penggunaan teknologi digital lebih inklusif yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Secara lebih khusus pemanfaatan teknologi terutama ditujukan untuk pengembangan UMKM dan keuangan inklusif.
2. Untuk meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan nilai ekonomi yang dapat diraih maka diperlukan pengembangan literasi dan keterampilan digital.
3. Percepatan digitalisasi untuk sektor-sektor yang kontributif dapat berpotensi sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam proses pemulihan ekonomi pascapandemi.
4. Menimbang pentingnya nilai ekonomi dari teknologi digital dan perlindungan data maka perbaikan tata kelola data global menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dibicarakan dalam forum G20.

Menyambung komitmen negara-negara G20 dalam *The G20 Digital Ministers' Declaration* dan *the G20 Rome Leaders' Summit Declaration* saat Presidensi Italia pada tahun 2021, *Digital Economy Task Force* (DETF) telah bertransformasi menjadi *Digital Economy Working Group* (DEWG), yang menjalankan tugas sesuai dengan Kerangka Acuan DEWG G20 yang diadopsi

pada tahun 2021 (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022).

Pada pembahasan mengenai transformasi digital dan ekonomi, tema utama yang diangkat Indonesia di DEWG G20 adalah “*Achieving a Resilient Recover: Working Together for More Inclusive, Empowering and Digital Sustainable Transformation*”, yang maknanya “Mencapai Pemulihan yang Tangguh: Bekerja Sama untuk Transformasi Digital yang Lebih Inklusif, Memberdayakan dan Berkelanjutan”.

Melalui berbagai pertemuan DEWG, Menkominfo menyatakan bahwa fokus utama aspek transformasi digital ada tiga, yaitu inklusivitas, empowering, dan sustainable. Pertama, inklusif menggambarkan cita-cita transformasi digital yang dapat diakses dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua, empowering menunjukkan gagasan dari transformasi digital untuk memberdayakan seluruh kalangan masyarakat. Ketiga, sustainable mewakili harapan bahwa transformasi digital dapat terus-menerus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mendukung sustainable development goals.

Menurut Johnny G Plate, melalui topik “*Connectivity and Post Covid-19 Recovery*”, Indonesia mengajak untuk mengatasi bersama kondisi ketidak- seimbangan pada lanskap transformasi digital. Membahas isu-isu ekonomi digital untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yang lebih kuat di skala global. Sedangkan melalui topik “*Digital Skills and Digital Literacy*”, Indonesia mengajak negara G20 meningkatkan nilai pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat luas. Sekaligus memfasilitasi penciptaan ekosistem talenta digital yang inklusif. Pada topik terakhir, “*Cross-border Data Flow and Data Free Flow with Trust*”, Indonesia akan

memfasilitasi diskusi arus data lintas batas negara, termasuk upaya penerimaan penerapan prinsip *lawfulness, fairness, transparency, dan resiprositas*.

Presidensi Indonesia akan melanjutkan pekerjaan presidensi sebelumnya dalam working group untuk membahas cara menggunakan teknologi digital untuk mendorong ekonomi digital yang tangguh dan berkembang secara berkelanjutan dan inklusif, sekaligus memitigasi tantangan dan risiko digital. Selanjutnya, DEWG menempatkan masalah DFFT (Data Free Flow with Trust) dan CBDF (Cross-Border Data Flow) sebagai prioritas utama Indonesia untuk memastikan bahwa ini konsisten dan selaras dengan tujuan DETF G-20 sebelumnya.

Permasalahan yang ditemukan dalam pembahasan ini yaitu disrupsi terhadap teknologi digital, termasuk kesenjangan digital seperti akses konektivitas, keterampilan digital masyarakat dan penggunaan data lintas negara. Di sisi lain, selama pandemi COVID-19, berbagai industri telah berkembang dan berkembang lebih cepat sebagai hasil dari kemajuan teknologi digital. Oleh karena itu, Indonesia menjadi presiden pertama Kelompok Kerja Ekonomi Digital yang dikenal sebagai DEWG (*Digital Economy Task Force*) di bawah presidensi G20 pada tahun 2022. Ini mungkin menjadi platform yang lebih luas untuk membahas masalah digital lintas sektor. Oleh karena itu, tujuan utama dari masalah ini adalah untuk menciptakan lanskap kerja sama baru antar negara guna menciptakan keamanan bersama di era digital.

Ada tiga prioritas utama untuk masalah ini; pemulihan dan konektivitas setelah pandemi COVID-19, keterampilan digital dan literasi digital, aliran data lintas negara dan aliran data bebas dengan

kepercayaan. Oleh karena itu, Indonesia percaya bahwa DEWG dapat mempercepat Agenda Transformasi Digital Indonesia dan memperkuat kolaborasi antar negara dalam mendukung pemerataan dan transformasi berbasis digital yang berkelanjutan untuk pemulihan global. Selain itu, peluang Indonesia untuk menjadi presiden G20 pada tahun 2022 sangat dipromosikan, khususnya berkaitan dengan masalah transformasi digital.

Ada tiga isu yang dapat mendorong transformasi digital dalam negeri menjadi semakin massif, yaitu; Konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi Covid-19, Literasi digital dan kecakapan digital, dan yang terakhir Aliran data gratis dengan kepercayaan atau DFFT (Data Free Flow with Trust) dan aliran data lintas batas atau CBDF (*Cross-Border Data Flow*).

Anggota G20 secara konsisten mengakui pentingnya data dalam ekonomi digital. CBDF-DFFT akan membuka peluang ekonomi dan perdagangan yang lebih besar yang akan menguntungkan negara-negara dalam era digital. Sejak 2017, DETF G20 telah membahas isu arus data lintas batas secara konsisten. Secara berturut-turut, pada tahun 2019, 2020, dan 2021, diskusi mengenai transfer data lintas batas terus berkembang untuk mengidentifikasi berbagai langkah yang diperlukan dalam memfasilitasi ekosistem digital lintas batas yang tepercaya. Presidensi sebelum Indonesia, pada 2021 telah meletakkan dasar untuk mengatur kolaborasi aliran data dengan mengusulkan pemetaan kesamaan, komplementaritas, dan elemen konvergensi antara pendekatan dan instrumen peraturan yang ada untuk memungkinkan interoperabilitas untuk DFFT dan CBDF. Berangkat dari pencapaian tersebut, Indonesia melanjutkan jalan dengan lebih memfasilitasi diskusi tentang kesamaan

dan perbedaan pandangan di antara anggota G20 tentang DFFT dan CBDF.

Indonesia akan menghadirkan Expo Transformasi Digital melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Pameran ini bertujuan untuk merangkum perjalanan transformasi digital Indonesia di berbagai sektor, seperti perdagangan, e-commerce, financial technology, pionir pendidikan digital (edu-tech) hingga kesehatan (health-tech). Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana menggunakan teknologi metaverse dalam menghadirkan Expo Transformasi Digital (Kominfo, 2022).

SIMPULAN

G-20, yang resmi dibentuk pada 26 September 1999, adalah sebuah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 20 negara, bank sentral, dan Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk mencari solusi atas krisis keuangan global dan membahas peraturan umum dan khusus untuk melindungi negara dari krisis yang akan datang. G-20 berusaha untuk mencapai pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Anggota dari forum G-20 terdiri dari Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Inggris, Argentina, Jerman, Brazil, Italia, Afrika Selatan, Perancis, Arab Saudi, Rusia, Turki, Jepang, Tiongkok, India, Korea Selatan, Australia, Indonesia dan Uni Eropa.

Sejarah KTT G-20 telah berkembang oleh para pemimpin selama 32 tahun, mulai dari pertemuan pertamanya di Rambouillet Paris pada tahun 1975, hingga kesempatan tahunan bagi negara tuan rumah yang menjadi upaya kebijakan luar negeri dan memberikan banyak peluang, mulai dari pertemuan substantif bersama, bilateral, maupun hiburan untuk delegasi dan media yang hadir. Secara khusus, forum menteri keuangan dan

gubernur bank sentral G-20 didirikan untuk membantu memperkuat struktur keuangan internasional, memenuhi kebutuhan untuk menangani masalah utama sistem moneter dan keuangan internasional, dan berfungsi sebagai platform untuk membicarakan masalah ekonomi internasional yang mendesak lainnya. G-20 terdiri dari negara-negara berkembang dan pasar berkembang yang penting secara sistemik dan telah berkembang menjadi kelompok informal otonom. Oleh karena itu, ini mencerminkan konstituensi global yang lebih luas, dan karena itu memiliki legitimasi yang lebih besar daripada G-7.

Indonesia memiliki peran penting sebagai presidensi G-20 karena posisinya sebagai tuan rumah dan pelaksana politik hukum kebijakan untuk menangani inflasi global. Menjaga komitmen antar negara guna saling bantu satu dengan lainnya dan terlibat dalam persaingan ekonomi yang sehat adalah salah satu komitmen Indonesia. Pemerintah Indonesia harus menerapkan politik hukum yang menekankan pentingnya kesepakatan pengendalian inflasi. Yang lebih penting lagi, hasil dari kesepakatan ini harus mendorong setiap negara peserta G-20 untuk melakukan ratifikasi, yang akan menjadi peraturan yang berlaku di setiap negara peserta G-20.

Presidensi G-20 Indonesia telah berusaha mengatasi berbagai masalah baru selama satu tahun kepemimpinannya. Mereka telah mencapai puncaknya dengan menghasilkan dokumen yang disebut Deklarasi Para Pemimpin G-20 Bali. Selain itu, G-20 merupakan tempat yang tepat untuk berbicara tentang cara-cara baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional. Karena G-20 telah memungkinkan investasi asing datang ke Indonesia dan membuat berbagai kerja sama bilateral dengan negara-

negara anggota, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat. Hal ini pastinya akan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menunjukkan kalau G-20 bukan hanya mempengaruhi perekonomian Indonesia saja, namun juga mempengaruhi perekonomian dunia.

Indonesia telah berpartisipasi dalam beberapa inisiatif positif untuk memastikan bahwa G20 dapat membantu baik negara maju maupun negara berkembang. Negara-negara maju dapat belajar bagaimana melihat dan memperlakukan negara berkembang sebagai mitra kerja sama global yang setara sebagai hasil dari peran ekonomi dan politik yang dimainkan Indonesia saat ini. Keanggotaan ASEAN pada G-20 Indonesia merupakan salah satu target yang harus dipromosikan secara intensif untuk meningkatkan kekuatan ASEAN di komunitas tingkat dunia. Oleh karena itu, mereka dapat melepaskan suara bersama dan bekerja sama didalam berbagai bidang. Indonesia membawa suara ASEAN sebagai bentuk tindakan strategis untuk mewujudkan tujuan bersama serta menyerukan suara-suara yang dibangun di negara yang berkembang di kawasan ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Heryati Naqsabandiyah, Muhammad Ibrahim Arfah, & Muhammad Solahudin Al-Ayubi. (2022). Indonesia's Contributive Role in the G20 to Mitigate the COVID-19 Pandemic. *Indonesia Post-Pandemic Outlook: Social Perspectives*, 2022, 9–34.
<https://doi.org/10.55981/brin.536.c4>
- Cakrayudha Ramadhanto, Tatok Djoko Sudiarto, B. K. P. (2022). *ANALISIS KONTEN AGENDA PRIORITAS INDONESIA PADA PRESIDENSI*

- G20. 7(12).
- Chen, J. (2021). *Group of Seven (G7) Defined_ Member Countries & How It Works*.
- Diplomasi, Ini. 2022. *Indonesia Usung Semangat Pulih Bersama dalam Presidensi G20 Tahun 2022*. 12 1. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3288/berita/presidensi-g20-indonesia>.
- Elisabeth, Adriana (2008). "Kecenderungan dan Tantangan Globalisasi Ekonomi terhadap Politik Luar Negeri Indonesia" in Ganewati Wuryandari (ed.), *Perkembangan Politik Internasional dan Pengaruhnya terhadap Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: LIPI Press.
- Fadly Kurniawan, M. (n.d.). *Potensi Indonesia dalam Penyaluran Kepentingan Melalui IJEPA Pasca KTT G20 di Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/article/s/c4nrlmjme2o>.
- Fathun, Laode Muhammad. "Peran Paradiplomacy dalam Presidensi G20 Indonesia: Studi Kasus Diplomasi Kota Jakarta pada Urban 20." *Indonesian Perspective* 2022.1.
- g20.org. 2022. "G20 Pedia Indonesia 2022." <https://research.ui.ac.id/research/wp-content/uploads/2022/02/G20pedia.pdf>.
- Gordon S. Smith. (2011). G7 TO G8 TO G20: EVOLUTION IN GLOBAL GOVERNANCE. *CIGI G20 PAPERS*, No.6.
- Hermawan, Y. P. (Yulius P., Friedrich Ebert Stiftung (Indonesia), & Universitas Katolik Parahyangan. (2011). *The role of Indonesia in the G-20 : background, role, and objectives of Indonesia's membership : G-20 research project*.
- Holsti, K.J. 1995. *International politics : a framework for analysis* Hermawan, Y. P. (2012). Legitimasi, efektivitas dan akuntabilitas G-20 sebagai klub eksklusif dalam pembentukan tata kelola ekonomi global. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 8(2).
- Ini Diplomasi. (2022). *No Title*. Kementerian Luar Negeri Indonesia. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3288/berita/presidensi-g20-indonesia>.
- Internasional, K., Sebagai, I., Dari, D., & Diplomatik, P. (2022). *Jurnal ilmu komunikasi citra*. 8(Nomor 1), 8–17.
- James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr. 1996. *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. Newyork: Longman.
- Jill Steans, Lloyd Pettiford, Thomas Diez, dan Imad El-Anis. 2010. *An Introduction to International Relations Theory: Perspectives and Themes, 3rd Editions*. London: Routledge.
- Julina, Sinta. 2022. "Komunikasi Internasional Indonesia Sebagai Presidensi G-20 Indonesia 2022 ditinjau dari Perspektif Diplomatik." *JURNAL ILMU KOMUNIKASI CITRA, Volume 8 No.1* 9.
- Jose, H. S. (2021). Indonesia's 2020 New Paradigm Of Collaborative Strategic Outlook In The South-South Cooperation (SSC) as The Bridge-BUILDER For The Post-Pandemic Development. *SSRN Electronic Journal*, 5–20. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3873642>
- Kenton, W. (2022). *What Is the Group of 20 (G-20)? Countries, Influence, and Agenda*. <https://www.clearias.com/g20-group-of-20/>

- Liberto, D. (2021). *Group of Eight (G-8)_ Overview, History, Criticisms*.
- Mahmudah. 2022. *Pengertian Kerjasama Multilateral, Jenis, Manfaat, dan 7 Contohnya*. 30 Oktober. Diakses 12 22, 2022. <https://berekonomi.com/kerjasama-multilateral/>.
- Matondang, E. (2021). Proyeksi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Era Pemerintahan Biden Dan Implikasinya Terhadap Diplomasi Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 11(3), 119-137.
- Nabilla, N. (2021). Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Neraca Perdagangan di Tengah Pandemi Covid-19. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 227-239.
- Na'im, A. A. (2022). *√ Pengertian Kerjasama Multilateral, Jenis, Manfaat, dan 7 Contohnya _ Ilmu Ekonomi*.
- Plano, Jack C., dan Roy Olton. 1979. *The International Relations Dictionary, 3rd Edition*. England: Clio Press, Ltd.
- Prayuda, R., & Sundari, R. (t.t.). *Journal of Diplomacy and International Studies Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>.
- Purwadi Hermawan, Yulius "Legitimasi, Efektivitas dan Akuntabilitas G-20 Sebagai Klub Eksklusif dalam Pembentukan Tata Kelola Ekonomi Global" Hal:203.
- Putri, A. S. (2020). G20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1), 53–64.
- Rafikasari, A. (2021). Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia melalui Kerja Sama Keantariksaan dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa*, 2(1), 27-41.
- Salim, Z. (2011). Indonesia in the G20: Benefits and Challenges Amidst National Interests and Priorities. *G20: Perceptions and Perspectives for Global Governance, January 2010*, 95–108. http://www.kas.de/upload/dokumente/2011/10/G20_E-Book/chapter_10.pdf
- Salsabilah Putri, Alvela, "G20: Mediator untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Hubungan Internasional Tahun XIII No.1, Januari - Juni 2020*, Hal:57.
- Solechah, W. M., & Sugito, S. (2023). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G-20. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 12–23. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i1.1487>.
- Siregar, I. H., 2021, *Politik Luar Negeri Indonesia Saat Pandemi Covid-19*.
- Tim Riset G-20, "Peran Indonesia dalam G-20:Latar belakang, Peran dan Tujuan Keanggotaan Indonesia" Proyek Riset G-20, Mei 2011.
- Urfah, S. (2017). *Pengaruh Keanggotaan Indonesia dalam Forum G-20 terhadap Pembangunan Infrastruktur di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Perpustakaan).
- Yanthi, Ni Putu Diah Mustika, Ni Made Yudhaningsih, and I. Made Anom Arya Pering. "Peluang Dan Tantangan SDM Bali Serta Strategi Dalam Menyambut Kegiatan Presidensi G20." *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS) 2.4* (2022): 633-6.